

Abstrak

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)

OLEH

DICKY RAMDHANI

PPNS Satpol PP merupakan aparat penegak hukum peraturan daerah dalam suatu pemerintahan daerah, namun dalam upaya penegakan hukum terhadap peraturan daerah pada kenyataannya tidak selalu berjalan dengan baik. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan PPNS Satpol PP terhadap pelanggaran peraturan daerah dan apa sajakah faktor penghambat PPNS Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami secara jelas mengenai pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan PPNS Satpol PP terhadap pelanggaran peraturan daerah, serta untuk mengidentifikasi faktor penghambat PPNS Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh dengan cara wawancara menggunakan pedoman tertulis terhadap responden yang telah ditentukan. Penelitian dilakukan di wilayah hukum Pemerintahan Kota Bandar Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil satuan polisi pamong praja terhadap pelanggaran peraturan daerah secara garis besar dilakukan dengan dua bentuk yaitu operasi yustisi dan non yustisi. Faktor penghambat pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil satuan polisi pamong praja terhadap pelanggaran peraturan daerah terdiri dari faktor *internal* dan *eksternal*.

Kata Kunci : Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja